

Abstrak

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, serta ketersediaan tenaga kesehatan tersebut. Malpraktek medis secara umum mencakup mengenai kesalahan dan kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis. Pengaturan mengenai tindakan dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai segala tindakan yang wajib dilakukan dokter dalam melakukan tindakan medis. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan sanksi bagi petugas medis yang melakukan malpraktik diwilayah kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal II?. 2) Bagaimana kendala yang di hadapi pihak UPTD. Puskesmas Abiansemal II jika petugas medisada yang melakukan malpraktik?. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi bagi petugas medis yang melakukan malpraktik diwilayah kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal II. 2) Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pihak UPTD. Puskesmas Abiansemal II jika petugas medisada yang melakukan malpraktik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris yaitu diambil dari fakta yang terjadi di lapangan, yang di dapatkan melalui penjelasan-penjelasan dari informan dan di pelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Pelaksanaan sanksi bagi petugas medis yang melakukan malpraktik diwilayah kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal II, yakni tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan perundang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan kode etik kedokteran yang berlaku selain itu juga adapun sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik. 2) Kendala yang di hadapi pihak UPTD. Puskesmas Abiansemal II jika petugas medis ada yang melakukan malpraktik, yakni kendala yang di hadapi pihak puskesmas kendala internal dan external dimana pihak medis yang ada melakukan malpraktik di luar pengetahuan pihak puskesmas.

Kata kunci: Penerapan, Sanksi Terjadi Malpraktik, UPTD Puskesmas Abiansemal.

Abstract

Health is a human right, meaning everyone has the same right to access to health services. The quality of safe, quality and affordable health services is also the right of all Indonesians to plan the needs of health workers nationally tailored to the needs based on health problems, the needs of the development of health development programs, and the availability of health workers. Medical malpractice in general includes the errors and omissions of doctors in performing medical actions. The arrangement regarding the actions of doctors is regulated in Law No. 29 of 2004 concerning the Practice of Medicine. The law regulates all actions that must be taken by doctors in carrying out medical actions. The formulation of the problems discussed in this study is: 1) How to implement sanctions for medical officers who commit malpractice in the UPTD work region. Puskesmas Abiansemal II? 2) How are the obstacles faced by the UPTD. Puskesmas Abiansemal II if the medics are doing malpractice? The purpose of this study is: 1) To find out the implementation of sanctions for medical officers who commit malpractice in the UPTD work region. Puskesmas Abiansemal II. 2) To find out the obstacles faced by the UPTD. Puskesmas Abiansemal II if the medical officer who performs malpractice. The type of research used in this study is Empirical Legal Research which is taken from facts that occur in the field, which are obtained through explanations from informants and studied with a real legal attitude or in accordance with the reality of life in society. The results of this study are : 1) Implementation of sanctions for medical personnel who commit malpractice in UPTD work. Puskesmas Abiansemal II, which is an act of malpractice committed by health workers has been regulated by law in law No. 23 of 1992 on health and the applicable medical code of ethics in addition to sanctions against the actions of medical personnel who commit malpractice. 2) The obstacles faced by the UPTD. Puskesmas Abiansemal II if there are medical officers who do malpractice, namely the obstacles faced by the puskesmas internal and external constraints where the existing medical parties perform malpractice beyond the knowledge of the puskesmas.

Keywords: Implementation, Sanctions Occur Malpractice, UPTD Puskesmas Abiansemal.